BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab ini penulis memaparkan beberapa teori dan konsep dari para ahli dan dari para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.

2.1.1 Akuntansi

Dalam suatu entitas yang mempunyai tata kelola yang baik terdapat suatu catatan ataupun pembukuan baik mengenai transaksi ataupun tentang kekayaan perusahaan itu sendiri, hal ini disebut dengan Akuntansi.

Menurut Warren dkk (2014:3) menyatakan bahwa pengertian akuntansi sebagai berikut:

> "Secara umum akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sistem informasi mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang tertarik. Akuntansi adalah bahasa bisnis (*language of business*) karena melalui akuntansi informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan".

Menurut Hanafi dan Halim (2009:27) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

> "Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut".

Informasi yang diserahkan yang diserahkan kepada pihak pemangku kepentingan, sebelumnya telah diolah dan diproses terlebih dahulu dengan aturan-aturan ataupun dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku. Menurut Warren dkk (2014:3) menyebutkan proses pengolahan informasi tersebut sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pemangku kepentingan.
2. Menilai kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.
4. Mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan.
5. Menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan.

2.1.1.1 Akuntansi Keuangan (*Financial*)

Pelaporan keuangan diperlukan tidak hanya oleh pihak internal tetapi digunakan oleh pihak eksternal. Akuntansi dalam perkembangannya terbagi menajdi dua yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan membahas tentang keterkaitan antara pihak eksternal dan laporan keuangan yang dibuat, sedangkan akuntansi manajerial tentang pihak internal.

Menurut Warren dkk (2014:3-4) menyatakan bahwa tujuan akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial sebagai berikut:

> "Tujuan dari akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk kebutuhan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan yang tidak terlibat di dalam bisnis. Sedangkan tujuan dari akuntansi manajerial adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan manajer dan karyawan dalam hal pengambilan keputusan".

Menurut Hanafi dan Halim (2009:29) menyebutkan bahwa akuntansi keuangan sebagai berikut:

> "Akuntansi keuangan adalah sistem pengakumulasian, pemrosesan, dan pengkomunikasian yang didesain untuk informasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dan kredit oleh pemakai eksternal".

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013) menyatakan akuntansi sebagai berikut:

> "Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada 3 aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Pengguna laporan keuangan terdiri dari pengguna internal dan pengguna eksternal".

2.1.1.2 Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)

Akuntansi pajak merupakan salah satu informasi yang digunakan perusahaan dalam pengelolaan usahanya. *Book tax differences* yang meliputi perbedaan temporer dan perbedaan permanen merupakan dalam informasi akuntansi perpajakan, sehingga informasi tersebut harus diketahui oleh *stakeholder* meskipun para *stakeholder* nantinya tidak menggunakan informasi yang telah disampaikan manajemen tersebut didalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan yang baik.

Akuntansi pajak menurut Hans et al (2012:6) dalam Riyana (2015) adalah sebagai berikut:

> "Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang bertujuan menghitung dan melaporkan objek pajak agar kewajiban pajak dapat dihitung, dilaporkan, dan dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Teori

> akuntansi pajak adalah logis dalam bentuk seperangkat azas atau prinsip yang diakui dalam ketentuan serta peraturan perpajakan. Sedangkan fungsi akuntansi pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan".

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:10) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

> "Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan".

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan kerugian material bagi WP (Wajib Pajak) yang bersangkutan.

2.1.1.3 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam akuntansi, *Agency Theory* menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*) dalam suatu perusahaan dipisahkan oleh kepentingan kepentingan masing-masing pihak yaitu *principal* sebagai pemilik perusahaan yang memiliki utilitas dan *agent* diberikan wewenang untuk mengoptimalkan utilitas atau kekayaan *principal*. Pada konsep *agency theory* terdapat pemisahan fungsi antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (pengelola/manajemen perusahaan). Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terjadi konflik keagenan.

Pada Lambert (2001) dalam Sanjaya (2008) menyatakan teori keagenan sebagai berikut:

> "Diperlukan kontrak kerja yang baik dan jelas antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), sehingga kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimumkan utilitas *principal,* dan dapat memuaskan serta menjamin agen untuk menerima *reward.* Utilitas dan *reward* tersebut didapat dari hasil aktivitas pengelolaan perusahaan yang tercermin dalam laba perusahaan".

Kontrak yang diterapkan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*), sehingga mengakibatkan *principal* mendelegasikan beberapa kewenangan kepada *agent* untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan perusahaan. Jika kedua belah pihak berhubungan untuk memaksimalkan utilitas, maka ada kemungkinan *agent* tidak selalu bertindak untuk kepentingan utama *principal.*

Menurut Sanjaya (2008) menyebutkan bahwa:

> "Prinsipal menyusun desain biaya pemonitoran untuk membatasi penyimpangan yang dilakukan oleh agen. Dalam beberapa hal, prinsipal

> akan memberi imbalan kepada agen untuk menjamin agen tidak mengambil tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi prinsipal".

Konflik kepentingan semakin tinggi terutama karena prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas agen. Prinsipal tidak mempunyai cukup informasi tentang kewenangan dan kinerja yang dilakukan oleh agen, sehingga terjadi asimetris informasi. Asimetri infromasi merupakan suatu kondisi dimana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak agen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak prinsipal yang umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).

Menurut Wijayanti (2006) menyatakan bahwa:

> "Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (*book tax differences*) dapat memberikan informasi tentang kewenangan manajemen (*management discretion*) dalam proses akrual, karena terdapat sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal".

Dengan demikian laba fiskal tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan. Menurut Hanlon (2005) menyatakan bahwa:

> "Apabila angka laba diduga oleh publik sebagai hasil rekayasa manajemen, maka angka laba tersebut dinilai mempunyai kualitas laba yang rendah dan kurang persisten".

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keadaan suatu entitas baik bagi pihak internal dalam suatu entitas ataupun pihak eksternal, yang memang memerlukan informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan. Laporan keuangan dipergunakan oleh manajemen puncak untuk dapat mengambil keputusan yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan, sedangakan bagi investor laporan keuangan juga berguna dalam pengambilan keputusan, apakah ingin menanamkan saham atau tidak dalam perusahaan tersebut.

Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut PSAK No.1 (2015:1) "Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan suatu entitas". Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter.

Menurut Kieso, dkk (2014:5) pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

> "*Financial statements are the principal means through which a company communicates its financial information to those outside it. These statements provide company's history quantified in money terms*".

Pengertian Laporan Keuangan menurut PSAK No.1 (2015:2) adalah sebagai berikut:

> "Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan

> informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga."

Menurut Hanafi dan Halim (2009:49) laporan keuangan sebagai berikut:

"Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya".

Berdasarkan keempat definisi diatas menunjukan bahwa laporan kuangan merupakan suatu penyajian terstruktur yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atasnya, yang disajikan dalam jangaka waktu tertentu dalam hal ini satu periode akuntansi.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat oleh suatu entitas tentunya memiliki suatu tujuan dan manfaat, baik bagi pembuatnya sendiri (entitas) maupun bagi pihak lain yaitu pihak eksternal dari entitas tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi laporan keuangan menjadi beragam dan luas, tidak hanya sebagai bukti pertanggungjawaban dari fungsi akuntansi, akan tetapi laporan keuangan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta masih banyak lagi fungsi lainnya.

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (2015:3) adalah:

> "Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi".

Menurut Fahmi (2014:5) pengertian dari tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

> "Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka dalam satuan moneter".

Menurut Kasmir (2013:10) tujuan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam satu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan laporan keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: "aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan

dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas". Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas setara kas.

2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Hanafi dan Halim (2009:34-38) karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bisa dipahami (*understandability*)
   Informasi akuntansi harus bisa dipahami oleh pemakai yang mempunyai pengetahuan bisnis dan ekonomi yang memadai dan yang mempunyai keinginan untuk mempelajari informasi tesebut dengan tingkat usaha yng memadai pula.
2. Bermanfaat untuk pengambilan keputusan
   Bermanfaat untuk pengambilan keputusan merupakan karakteristik kualittif keseluruhan yang digunakan untuk memertimbangkan kualitas informasi akuntansi.
3. Relevan
   Suatu informasi bisa dikatakan relevan apabila adanya informasi tersebut bisa membuat perbedaan keputusan yang diambil.
4. Nilai prediksi dan umpan balik
   Informasi akuntansi mempunyai nilai prediksi apabila informasi tersebut bisa dipakai untuk memprediksi lebih akurat berdasarkan informasi masa lalu dan saat sekarang.
5. Tepat waktu
   Tepat waktu bisa diartikan sebagai ketersediaan informasi ke pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kepastiannya untuk mempengaruhi keputusan.
6. Reliabilitas
   Informasi yang relibel bebas dari bias-bias tertentu dan bisa mencerminkan apa yang akan diukur (representatif).
7. Bisa diverifikasi
   Bisa diverifikasi juga sering disebut sebagai objektif. Informasi bisa diverifikasi apabila pengukur (misal akuntan) bisa sampai pada kesimpulan bersama bahwa metode yang dipilih bersih dari

bias-bias tertentu, dan dengan demikian metode tersebut bisa diduplikasi.

8. Representatif
   Representatif merupakan keterkaitan antara pengukuran dan apa yang diukur. Istilah lain yang sering digunakan yang mempunyai arti sama dengan representatif adalah valid.
9. Kenetralan
   Informasi akuntansi akan netral apabila bebas dari bias-bias tertentu yang akan mempengaruhi hasil ke arah tertentu. ditujukan untuk tujuan yang umum dan bervariasi, bukan untuk tujuan yang sempit.
10. Konsistensi dan dibandingkan
    Karakteristik kualitatif tambahan dari informasi akuntansi adalah bisa diperbandingkan (*comparability*) dan konsistensi. Informasi akuntansi akan lebih bermanfaat apabila informasi tesebut dibandingkan dengan informasi yang serupa untuk perusahaan lain (*intecompany camparasion*), atau dengan informasi yang serupa dari masa lalu perusahaan (*intracompany comparasion*).
11. Batasan terhadap hirarki informasi
    Sama seperti halnya komoditi ekonomi lainnya, keputusan yang berkaitan dengan komoditi tersebut harus dilandasi prinsip manfaat-biaya.
12. Material
    Informasi akuntansi dikatakan material apabila ketiadaan informasi tersebut atau penyampaian yang salah (*misstatement*) akan mempengaruhi pertimbangan seorang pengambil keputusan.

2.1.2.4 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, merupakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas/perusahaan untuk pihak-pihak yang berkepentingan atasnya. Jenis laporan keuangan bemacam-macam baik berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan/entitas yang bersangkutan dan pihak yang terkait untuk menggunakan informasi keuangan pada suatu entitas tertentu.

Menurut Hanafi dan Halim (2009: 12-20) secara umum ada tiga Laporan Keuangan yang pokok yang dihasilkan oleh perusahaan:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
   "Neraca digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Neraca bisa digambarkan sebagai potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu (*snapshot* keuangan perusahaan), yang meliputi aset (sumber daya atau *resources*) perusahaan dan laim atas aset tesebut (meliputi hutang dan saham sendiri)".
2. Laporan laba/rugi
   "Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang berisi mengenai informasi yang mencakup kineja suatu karyawan yang dinyatakan dengan perbandingan antara pendapatan dan biaya".
3. Laporan arus kas
   "Laporan arus kas berisi informasi mengenai informasi kas yang keluar dan kas yang masuk dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan".

Menurut SAK ETAP (2017) menyatakan neraca adalah sebagai berikut:

> "Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi yang menunjukan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: kas dan setara kas; piutang usaha dan piutang lainnya; persediaan; properti investasi; aset tetap; aset tidak berwujud; utang usaha dan utang lainnya; aset dan kewajiban pajak; kewajiban diestimasi; ekuitas".

Menurut SAK ETAP (2017) menyatakan bahwa laporan laba/rugi sebagai berikut:

> "Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: pendapatan; beban keuangan; bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; beban pajak; laba atau rugi neto".

Menurut Menurut SAK ETAP (2017) menyatakan bahwa laporan arus kas adalah sebagai berikut:

> "Laporan arus kas mensyaratkan ketentuan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode."

Amos Rico (2014) menyebutkan bahwa laporan keuangan menurut dasar penyusunan atau pun prisnsipnya terbagi menjadi dua laporan keuangan yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan menggunakan dasar akrual atau kas. Hal ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 pasal 28 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyebutkan bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dengan setsel akrual atau setsel kas.

2.1.3 Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal (*Book Tax Differences*)

Laba akuntansi merupakan terminologi yang digunakan standar akuntansi keuangan yang berarti laba bersih atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi dengan beban pajak. Di sisi lain, penghasilan kena pajak atau laba fiskal merupakan terminologi pada perpajakan yang berarti laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan.

Pada tingkat perusahaan, manajemen menghitung laba perusahaan untuk dua tujuan setiap tahunnya, yaitu tujuan untuk pelaporan keuangan berdasarkan prinsip dasar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan pajak untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak (*taxable income*) atau laba fiskal. Peraturan pajak di Indonesia mengharuskan laba fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang menjadi dasar perhitungan laba akuntansi, yaitu metode akrual, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba tersebut, karena setiap akhir tahun perusahaan diwajibkan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak. Suswandika dan Astika (2013) menyatakan bahwa perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal yang timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi komersial dengan perpajakan menyebabkan perusahaan setiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal.

Menurut Barus dan Rica (2014) perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

> "Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal adalah suatu perbedaan yang terjadi karena tidak semua peraturan akuntansi dalam standar akuntansi keuangan dapat diperoleh dalam peraturan perpajakan".

Menurut Fatkhur (2013) perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal sebagai berikut:

> "*Book tax differences* dalam hal ini merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan (*deffered tax benefit*)".

Laba fiskal dapat diketahui dengan membuat rekonsiliasi fiskal sehingga setiap perusahaan wajib membuat rekonsiliasi fiskal setiap tahunnya. Dalam rekonsiliasi fiskal, menunjukan hubungan antara besar laba fiskal dengan beban pajak tangguhan. Pradipta (2014) menyatakan bahwa jika laba fiskal bertambah maka beban pajak terutang akan semakin besar, dan sebaliknya jika laba fiskal berkurang maka beban pajak terutang akan semakin kecil. Martandi dan Persada (2010) menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal di akhir periode pembukuan menyebabkan terjadi perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran berbeda antara standar akuntansi keuangan dan peraturan pajak. Penyebab perbedaan tersebut secara umum dikelompokkan kedalam perbedaan permanen atau tetap (*permanent differences*) dan perbedaan temporer atau waktu (*temporary differences*).

Menurut Resmi (2014:403) penyebab terjadinya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal adalah sebagai berikut:

> "Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*)".

Perbedan permanen atau tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap/permanen mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Pada umumnya menurut Amos Rico (2014) perbedaan permanen terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya tedapat pada pasal 4 ayat (3)

UU No. 36 Tahun 2008, pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008 dan pasal 18.

Menurut Resmi (2014:403) terdapat 3 contoh dalam perbedaan tetap/permanen yaitu:

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final.
2. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
3. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasilan bruto.

Perbedaan temporer atau perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dengan akuntansi. Menurut Resmi (2014:403) "Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba". Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Menurut Amos Rico (2014) tedapat empat jenis transaksi yang menimbulkan perbedaan waktu adalah:

1. Penghasilan masuk perhitungan pajak sesudah laba akuntansi.
2. Biaya atau rugi perhitungan pajak sesudah laba akuntansi.
3. Pendapatan pajak sebelum laba akuntansi.
4. Biaya atau rugi pajak sebelum laba akuntansi.

Suwandika dan Astika (2013) meyebutkan bahwa perbedaan antara laba fiskal dengan laba akuntansi dibagi menjadi tiga:

1. *Book-tax differences* besar positif (*Large positive BTD*-LPBTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal.
2. *Book-tax differences* besar negatif (*Large negative BTD*-LNBTD), yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, dimana laba akuntansi lebih kecil dari laba fiskal.
3. *Book-tax differences* kecil (*Small BTD*), selisih yang sangat kecil sekali antara laba akuntansi dan laba fiskal.

Berdasarkan dua kelompok penyebab perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal, perbedaan permanen tidak berpengaruh signifikan karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi perioda terjadinya saja dan tidak mengindikasikan kualitas laba, selain itu perbedaan permanen tidak menimbulkan konsekuensi adanya penambahan atau pengurangan jumlah pajak masa depan. Sebaliknya, perbedaan temporer dapat menimbulkan jumlah pajak yang dapat ditambahkan atau dikurangkan di masa depan (*future taxable and future deductible amounts*), yang dapat digunakan untuk penilaian kualitas laba di masa depan.

Menurut Wiryandari (2009), Perbedaan antara laba akuntasi dengan laba fiskal menggunakan proksi beban pajak tangguhan (*deffered tax expense*) yang dibagi total aset, dengan formula sebagai berikut:

BTD =

Beban pajak tangguhan merupakan salah satu proksi untuk mengukur perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal. Selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal akan diproksikan kepada akun kewajiban pajak tanggungan yang akan menjadi beban pajak tangguhan pada periode berikutnya.

2.1.3.1 Perbedaan Laporan Keuangan Akuntansi dengan Laporan Keuangan Fiskal

Membicarakan masalah perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, sama halnya dengan membicarakan masalah akuntansi

pajak, sedangkan akuntansi pajak pada umumnya menyangkut masalah kapan suatu penghasilan diakui sebagai penghasilan dan kapan suatu biaya diakui sebagai pengurang dari penghasilan tersebut. Masalah ini sesungguhnya tergantung kepada tahun pajak atau tahun buku wajib pajak, metode akuntansi yang digunakan, serta doktrin dan konsep yang menjadi acuannya.

Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial/akuntansi dengan laporan keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi keuangan yang mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Menurut Resmi (2014:400) menyatakan bahwa penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

> "Karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya".

Terdapat perbedaan dasar penyusunan pada laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan peraturan perpajakan menggunakan dasar akrual atau kas. Hal ini diatur dalam UU No.28 Tahun 2007 pasal 28 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menyebutkan bahwa pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No. 1 menyebutkan bahwa entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual kecuali, laporan arus kas.

Tujuan utama akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada manager, pemegang saham, pemberi kredit, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dan merupakan tanggung jawab para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama sistem perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil, dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan yang semena-mena (Martani dan Persada,2009).

Menurut Resmi (2014:399) menyatakan bahwa "Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatau entitas (Wajib Pajak)". Perusahaan tidak perlu melakukan pembukuan ganda untuk memenuhi perbedaan tujuan kepentingan tersebut, sehingga perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal, perubahan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial tersebut. Rekonsiliasi fiskal dilakukukan perusahaan karena terdapat perbedaan penghitungan laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal).

Tabel 2.1

Perbedaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

	Akuntansi Komersial	**Akuntansi Fiskal**
Masa Manfaat	1. Masa manfaat ditentukan aktiva berdasarkan taksiran umur ekonomis maupun umur teknis. 2. Ditelaah ulang secara periodik. 3. Nilai residu bisa diperhitungkan.	1. Ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. 2. Nilai residu tidak dapat diperhitungkan
Harga	1. Untuk pembelian menggunakan	1. Untuk transaksi yang tidak

Perolehan	harga sesungguhnya. 2. Untuk pertukaran aktiva tidak sejenis menggunakan harga wajar. 3. Untuk pertukaran sejenis berdasarkan nilai buku aktiva yang dilepas. 4. Aktiva sumbangan berdasarkan harga pasar.	mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga sesungguhnya. 2. Untuk transaksi yang mempunyai hubungan istimewa berdasarkan harga pasar. 3. Untuk transaksi tukar menukar adalah berdasarkan harga pasar. 4. Dalam rangka likuidasi, peleburan, pemekaran, pemecahan atau penggabungan adalah harga pasar kecuali, ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. 5. Revaluasi adalah sebesar nilai setelah revaluasi.
Metode Penyusutan	1. Garis lurus. 2. Jumlah angka tahun 3. Saldo menurun/menurun berganda. 4. Metode jam jasa 5. Unit produksi. 6. Anuitas. 7. Sistem persediaan. 8. WP dapat memilih salah satu metode yang dianggap sesuai asal diterapkan secara konsisten dan metode penyusutan harus ditelaah secara periodik.	1. Untuk aktiva tetap bangunan adalah garis lurus. 2. Untuk aktiva tetap bukan bangunan WP dapat memilih garis lurus atau saldo menurun ganda asal diterapkan secara taat asas.
Sistem Penyusutan	Penyusutan secara individual kecuali untuk peralatan kecil, boleh secara golongan.	1. Penyusutan individual. 2. Penyusutan gabungan.
Saat dimulainya penyusutan	1. Saat perolehan. 2. Saat penyelesaian.	1. Saat perolehan. 2. Dengan izin Menteri Keuangan dapat dilakukan pada penyelesaian atau tahun mulai menghasilkan.

Sumber: Suandy (2011)

Dari perbedaan laporan keuangan tersebut menyebabkan pula perbedaan pula terhadap laba akuntansi dengan laba fiskal perusahaan, yang disebut dengan *book tax differences*.

2.1.3.2 Rekonsiliasi Fiskal

Pada umumnya perusahaan-perusahaan di Indonesia menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui proses rekonsiliasi. Menurut pasal 1 (29) UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara tertatur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013), rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut:

> "Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka WP tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan yang didasari SAK-ETAP. Setelah dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal Penghasilan Kena Pajak (PhKP) yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. "

Menurut Kiswara dalam Riyana (2015), rekonsiliasi merupakan penggabungan antara penyajian laporan laba rugi komersial dan laba rugi fiskal guna memperhitungkan penghasilan kena pajak. Di akhir periode pembukuan, rekonsiliasi fiskal menyebabkan terjadinya perbedaan antara jumlah laba bersih sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak yang merupakan dasar pengenaan

pajak. Menurut Resmi (2014:400), untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan melalui penyesuaian atau proses rekonlisiasi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka yang diprioritaskan adalah ketentua perpajakan.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut.

Menurut Resmi (2014:404) teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan

sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.

3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Dapat disimpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atau koreksi pendapatan dan beban antara akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Penyesuain atau koreksi-koreksi dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Koreksi fiskal positif

   Koreksi fiskal positif adalah pengurangan biaya dan/atau penambahan pendapatan yang diakui dalam laporan laba rugi komersial yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang.

2. Koreksi fiskal negatif

   Koreksi fiskal negatif adalah penambahan biaya dan/atau pengurangan pendapatan yang diakui dalam akuntansi komersial yang mengakibatkan pengurangan jumlah pajak pengahasilan terutang.

Menurut Resmi (2014:405) perbedaan dimasukkan sebagai koreksi fiskal positif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi.

Sedangkan menurut Agoes dan Trisnawati (2013:239) koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/*non-deductible expense* – Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Menurut Resmi (2014:405) perbedaan dimasukkan sebagai koreksi negatif apabila:

1. Pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal (bukan Objek Pajak) tetapi diakui menurut akuntansi.
2. Biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya/pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi.
3. Suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Sedangkan menurut Agoes dan Trisnawati (2013:239) koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak – Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final – Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
3. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.

5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

2.1.3.3 Perbedaan Tetap/Permanen (*Permanent Differences*)

Perbedaan tetap/permanen terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap/permanen mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Misalnya, bunga deposito diakui sebagai pendapatan dalam laba akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pendapatan dalam fiskal. Contoh perbedaan tetap/permanen lainnya yaitu penghasilan dalam bentuk natura diakui sebagai penghasilan dalam akuntansi komersial, tetapi dalam akuntansi perpajakan, penghasilan dalam bentuk natura bukan merupakan objek pajak. Contoh lainnya misalnya biaya sumbangan. Dalam akuntansi komersial biaya sumbangan diakui sebagai biaya, tetapi dalam akuntansi perpajakan, biaya sumbangan tidak diakui sebagai biaya (bukan objek pajak). Pada umumnya perbedaan tetap/permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada:

1. Pasal 4 ayat (3) UU No.36 Tahun 2008.

   Perbedaan tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan keuangan laba rugi komersial untuk memperoleh laba fiskal. Berikut ini beberapa contoh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:

a. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang dibentuk secara sah.
b. Warisan.
c. Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
e. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
f. Bagian yang laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma dan kongsi.

2. Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008.

Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Seperti halnya dengan perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan untuk memperoleh laba fiskal. Berikut beberapa

contoh pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:

a. Pembagian laba laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk kenikmatan dan natura.
e. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
f. Pajak penghasilan.
g. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

3. Pasal 18 UU Pajak Penghasilan.

   Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan/Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan penghitungan pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

   a. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak.
   b. Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri.
   c. Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.

Menurut Resmi (2014:403) contoh perbedaan tetap/permanen sebagai berikut:

1. Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
2. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

3. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

Sedangkan menurut Agoes dan Trisnawati (2013:238) beda tetap/permanen biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan PhKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final – Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
2. Penghasilan yang bukan objek pajak – Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
3. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran – Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
4. Beban yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final.
5. Penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura.
6. Sanksi perpajakan.

2.1.3.4 Perbedaan Waktu/Temporer (*Temporary Differences*)

Perbedaan waktu/temporer terjadi karena perbedaan waktu pengakuan dan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup pada periode sesudahnya. Contoh perbedaan waktu/temporer yaitu pengakuan piutang tak tertagih, penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud atau hak, penilaian persediaan, dan lain-lain.

Sesuai namanya, beda waktu/temporer merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Menurut Agoes dan Trisnawati (2013:238) beda waktu/temporer biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dan akuntansi dalam hal:

1. Akrual dan realisasi.
2. Penyusutan dan amortisasi.
3. Penilaian persediaan.
4. Kompensasi kerugian fiskal.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU Pajak No.36 Tahun 2008) yang terkait dengan perbedaan temporer adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) huruf (h)

   Ketentuan perundang-undagan perpajakan yag berkaitan dengan penghapusan piutang tidak tertagih fiskal. Secara lengkap pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

   Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdarkan penghasilan bruto dikurangi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

   a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
   b. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang

negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.

c. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.

d. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Yang pelaksanannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2. Pasal 10 ayat (6)

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode nilai persediaan. Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau denga cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama".

3. Pasal 11 dan pasal 11 A

Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang metode penyusutan dan amortisasi. Beberapa hal yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut misalnya mengenai penetapan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud serta penetapan masa manfaat dan amortisasi harta tak berwujud.

Menurut PSAK No. 46 paragraf kelima belas revisi 2014 perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau kewajiban dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Perbedaan temporer ini dapat berupa:

1. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah (amount) dalam perhitungan laba fiskal perioda mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan (*recovered*). Atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).
2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang dapat dikurangkan (*deductible amounts*) dalam perhitungan laba fiskal perioda mendatang pada saat nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (*settled*).

Perbedaan metode penyusutan atau amortisasi antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Ketentuan Penyusutan atau Amortisasi menurut Perpajakan dan menurut Akuntansi

Ketentuan Peraturan Peundang-undangan Perpajakan	Standar Akuntansi Keuangan
Terdapat pengelompokan aset yang terdiri dari kelompok harta berwujud dan tidak berwujud. Kelompok harta berwujud terdiri dari: I. Bangunan a. Permanen b. Tidak Permanen	Tidak terdapat pengelompokan aset yang didasarkan pada penyusutan atau amortisasi. Pengelompokan aset didasarkan menurut kelancarannya dan ketetapannya, yang terdiri dari aset berwujud, aset tetap, aset tidak berwujud, investasi jangka panjang dan aset lain-

Kelompok harta tidak berwujud terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.	lain.
Masa manfaat ditetapkan berdasarkan pengelompokan aset.	Tidak ada penetapan masa manfaat.
Tarif per kelompok ditetapkan.	Tarif tidak diatur.
Hanya tiga metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode satuan produksi.	Banyak pilihan metode penyusutan, diantaranya yaitu, metode garis lurus, metode saldo menurun, metode saldo menurun ganda, metode jumlah angka tahun, dan metode satuan produksi.

Sumber: Zain (2008)

2.1.4 Tingkat Hutang

Menurut FSAB (*Financial Accounting Standard Board*) hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa mendatang yang mungkin timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu.

Kewajiban atau hutang adalah semua kewajiban perusahaan kepada pihak-pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal suatu perusahaan. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kewajiban lancar (kewajiban jangka pendek) dan kewajiban jangka panjang. Perusahaan lebih memilih menggunakan hutang sebagai sumber dana karena hutang dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan, sehingga pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan lebih kecil. Penghematan pajak dapat menjadikan laba yang diperoleh oleh perusahaan cukup besar.

Menurut Munawir (2014:18) mendefinisikan hutang sebagai berikut:

> "Hutang diartikan sebagai seluruh kewajiban perusahaan kepada kreditor atau pihak lain yang memberikan pinjaman modal kepada perusahaan".

Menurut Fahmi (2014:160) mendefiniskan hutang/kewajiban sebagai berikut:

> "Utang adalah kewajiban (*liabilities*). Maka *liabilities* atau utang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi dan sejenisnya".

Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam Fahmi (2014:161) menyatakan bahwa:

> "Kewajiban adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi (saldo kredit bukan akibat saldo negatif aktiva)".

2.1.4.1 *Leverage*

Leverage biasanya digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Dengan memperbesar tingkat *leverage* maka hal ini akan berarti bahwa tingkat ketidakpastian dari *return* yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula. Tingkat *leverage* ini bisa saja berbeda-beda pada setiap perusahaan atau dari satu periode ke periode lainnya dalam satu perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage* akan semakin tinggi tingkat risiko yang dihadapi serta semakin besar tingkat *return* atau penghasilan yang diharapkan.

Untuk mengukur tingakt hutang suatu perusahaan menggunakan rasio *leverage.* Menurut Kasmir (2013:151) *leverage* adalah sebagai berikut:

"Rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang".

Menurut Fahmi (2014:79) *leverage* adalah sebagai berikut:

"Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya".

Maka dapat disimpulkan bahwa *leverage* atau rasio solvabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana aset atau modal perusahaan dibiayai oleh hutang.

2.1.4.2 Jenis-Jenis *Leverage*

Menurut Agus Sartono (2014:457) jenis-jenis *leverage* yaitu:

"*Leverage* dibedakan menjadi dua yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*".

Berikut penjelasan dari *operating leverage* dan *financial leverage*:

1. *Operating Leverage*

   Menurut Hanafi (2014:329) *operating leverage* adalah:

   "*Operating leverage* bisa diartikan sebagai seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional".

2. *Financial Leverage*

   Menurut Sartono (2014:263) *financial leverage* adalah:

   "Penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan beranggapan bahwa akan memberikan keuntungan".

2.1.4.3 Metode Pengukuran *Leverage*

Dalam *leverage*, analisa dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

1. Rasio total utang terhadap total aset (*Debt to total asset ratio*)

   Menurut Kasmir (2013:156) rasio total utang terhadap aset merupakan:

   "Rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva".
   Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio total utang terhadap aset adalah sebagai berikut:

   Debt to Total Asset Ratio = x 100%

2. Rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to equity ratio*)

   Menurut Kasmir (2013:158) rasio utang terhadap ekuitas merupakan:

   "Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas".

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap ekuitas adalah sebagai berikut:

Debt to Equity Ratio = x 100%

3. Rasio laba terhadap bunga (*Time Interest Earned*)

Menurut Agus Sartono (2014:121) rasio laba terhadap bunga merupakan:

> "Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga".

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio laba terhadap bunga adalah sebagai berikut:

Time Interest Earned=

atau

Time Interest Earned =

4. Rasio penutupan beban tetap (*Fixed Charge Coverage*)

Menurut Kasmir (2013:162) rasio penutupan beban tetap merupakan:

"Perhitungan *fixed charge coverage* dapat dihitung dengan menjumlahkan laba setelah pajak, biaya bunga dan kewajiban dibandingkan dengan biaya bunga dan kewajiban sewa".

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio penutupan beban tetap adalah sebagai berikut:

Fixed Charge Coverage =

2.1.4.4 Pengukuran Tingkat Hutang

Besarnya tingkat hutang perusahaan akan menyebabkan perusahaan meningkatkan persistensi laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik di mata auditor dan investor (Fanani, 2010). Dengan kinerja yang baik tersebut maka diharapkan kreditur tetap memiliki kepercayaan terhadap perusahaan, sehingga mudah meminjamkan dana, dan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus *debt to total asset ratio*. Dengan alasan bahwa *debt to asset ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Tingkat hutang diukur dengan proksi rasio hutang terhadap total aktiva (*debt to total asset ratio*). Rasio hutang terhadap total aktiva didapat dari membagi total hutang perusahaan dengan total aktiva-nya, yaitu:

Debt to Total Asset Ratio = x 100%

Dari hasil pengukuran apabila rasionya tinggi artinya pendanaan dengan hutang semakin banyak maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi hutang-hutangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Dengan demikian pula apabila

rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan hutang (Kasmir 2013:156).

2.1.5 Persistensi Laba

Laba merupakan suatu indikator kesuksesan suatu badan usaha atau entitas, karena semakin tingginya laba yang diperoleh maka semakin tinggi pula keberhasilan yang dicapai. Oleh karena itu, laba menjadi tujuan utama yang ingin dicapai baik oleh badan usaha itu sendiri ataupun pihak-pihak yang akan menjadi investor atau kreditur maupun pihak yang mempunyai kepentingan lain bagi badan usaha tersebut, karena laba merupakan salah satu indikator yang mereka perhatikan.

Menurut Hanafi dan Halim (2014:16) menyatakan bahwa laba sebagai berikut:

> "Laba bersih merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi dengan total biaya".

Menurut M. Nafarin (2013:788) menyatakan bahwa laba sebagai berikut:

> "Laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarnya diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya".

Berdasarkan beberapa konsep definis laba diatas, maka dapat disimpulkan bahwa laba merupakan seluruh total pendapatan yang dikurangin total biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Selama ini laba menarik perhatian investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, seperti penilaian kinerja manajemen, penentuan

kompensasi manajemen, pemberian deviden kepada pemegang saham dan lain sebagainya. Oleh karena itu laba yang perlu diperhatikan oleh para calon maupun investor bukan hanya laba yang tinggi, namun juga laba yang persisten.

Bila perusahaan tiba-tiba melaporkan laba dengan tingkat kenaikan yang sangat signifikan dibandigkan tahun-tahun sebelumnya maka ada kemungkinan manajemen telah merekayasa dengan menggunakan cara-cara yang tidak etis. Sebaliknya bila perusahaan tiba-tiba melaporkan laba tingkat penurunan yang sangat drastis atau mengalami kerugian dalam jumlah besar tanpa ada keterangan yang memadai juga patut dicurigai karena mungkin saja manajemen berusaha menghindari pajak.

Ada beberapa cara untuk mengukur kualitas laba yaitu salah satunya adalah menggunakan persistensi laba. Persistensi laba mengindikasikan laba yang berkualitas karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu, serta menggambarkan perusahaan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menyesatkan pengguna informasi, karena laba perusahaan yang tidak berfluktuatif tajam.

Menurut Sofyan Syarif Harahap (2011:40) persistensi laba adalah sebagai berikut:

> “Revisi laba yang mencerminkan kualitas laba perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu”.

Menurut Celindra (2014:5) persistensi laba adalah sebagai berikut:

> "Persistensi laba merupakan kemampuan laba yang akan dijadikan indikator laba pada periode mendatang yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang dalam jangka panjang".

Menurut Chandarin (2003) dalam Fanani (2010) mengungkapkan bahwa laba yang persisten adalah sebagai berikut:

> "Laba yang persisten adalah laba akuntansi yang memiliki sedikit atau tidak mengandung gangguan (*noise*), dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya."

Menurut Penman dan Zhang (2002) dalam Fanani (2010) mendifinisikan persistensi laba sebagai berikut:

> "Persistensi laba sebagai revisi dalam akuntansi yang diharapkan di masa mendatang (*expected future earnings*) yang disebabkan oleh inovasi laba tahun berjalan (*current earnings*)".

Persistensi laba sering digunakan sebagai pertimbangan kualitas laba karena persistensi laba merupakan komponen dari karakteristik kualitatif relevansi, yaitu *predictive value* (Jonas dan Blanchet, 2002) dalam Asma (2013).

Berdasarkan beberapa konsep persistensi laba diatas, maka dapat disimpulkan persistensi laba adalah laba yang stabil dan tidak berubah-rubah atau komponen yang mampu bertahan terlihat dari laba periode berjalan, sehingga laba yang stabil dan persisten memudahkan manajer dalam meramalkan atau memprediksi laba di masa yang akan datang.

Persistensi laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode berjalan dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumya.

Persistensi laba dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Dimana:

: Laba akuntansi sebelum pajak satu perioda masa depan

: Konstanta

: Koefesien regresi

: Laba akuntansi sebelum pajak perioda sekarang

Menurut Wiryandari dan Yulianti (2008) dalam Suswandika dan Astika (2013) menggunakan laba akuntansi sebelum pajak tahun depan atau *Pre-Tax Book Income* () sebagai proksi dari laba akuntansi masa depan yang dibagi dengan total aset. Jadi laba sebelum pajak pada masa depan () adalah tahun periode +1 dari laba perusahaan sebelum pajak ().

Persistensi laba memfokuskan pada koefisien regresi laba sekarang terhadap laba mendatang. Hubungan tersebut dapat dilihat dari koefisien *slope* regresi antara laba sekarang dengan laba mendatang. Semakin tinggi (mendekati angka 1) koefisiennya menunjukkan persistensi laba yang dihasilkan tinggi, sebaliknya jika nilai koefisiennya mendekati nol, persistensi labanya rendah atau laba transitorinya tinggi. Jika nilai koefisiennya bernilai negatif, pengertiannya terbalik, yaitu nilai koefisien yang lebih tinggi menunjukkan kurang persisten, dan nilai koefisien yang lebih rendah menunjukkan lebih persisten.

Dapat disimpulkan bahwa persistensi laba merupakan kemampuan laba sekarang yang diharapkan mampu menjelaskan laba pada masa yang akan datang. Persistensi dapat dilihat dari keseluruhan laporan keuangan ataupun diukur berdasarkan komponen laporan keuangan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang menguji kemampuan *book tax differences* dalam memprediksi kinerja perusahaan masa depan terutama yang berhubungan dengan informasi laba. Berikut beberapa hasil dari penelitian terdahulu; I Made Andi Suwandika (2013) pada penelitiannya mendapat kesimpulan bahwa semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (*large negative book-tax differences*) tidak menunjukkan persistensi laba rendah. Kemudian semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (*large positive book-tax dofferences*) maka semakin rendah presistensi laba.

Penelitian mengenai persistensi laba juga dilakukan oleh Fanani (2010) yang memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi laba yaitu tingkat hutang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan pada persistensi laba.

Asma (2013) menemukan bahwa aliran kas operasi berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba, perbedaan antara laba akuntansi dengan fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap persistensi laba.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Barus dan Rica (2014) pada populasi perusahaan manufaktur yang berada di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian

menunjukkan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal berpengaruh positif terhadap persistensi laba sedangkan tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap persistensi laba.

Hasil penelitian yang lainnya dilakukan oleh Riyana (2015) yang melakukan penelitian dengan menggunkan pengaruh perbedaan permanen dan perbedaan temporer yang merupakan proksi dari *book tax differences* (perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan permanen dan perbedaan temporer berpengaruh negatif terhadap persistensi laba satu periode kedepan.

Penelitian yang dilakukan oleh Martini dan Persada (2009) yang melakukan penelitian yang berfokus pada *book tax gap* dapat digunakan untuk menilai kualitas laba akuntansi. Penelitian ini memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *book tax gap* dengan menggunakan perbedaan temporer (*temporary differences*) dan perbedaan permanen (*permanent differences*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan permanen dan perbedaan temporer berpengaruh negatif terhadap persistensi laba satu periode kedepan.

Fatkhur (2013) dengan judul penelitiannya Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi laba dengan Komponen Akrual dan Aliran kas Sebagai Variabel Moderasi. Menunjukan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia ketika mempunyai perubahan pendapatan, dan nilai aktiva tetap kotor yang besar mengakibatkan perusahaan tersebut mempunyai perbedaan besar antara laba akuntansi dan laba fiskal (*Large Book-tax Differences*). *Book-tax differences* dapat digunakan untuk menilai kebijakan

manajemen (agen) dalam proses akrual yang berkaitan dengan mengestimasi nilai depresiasi dan pengakuan penghasilan.

Tabel 2.3

Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Made Andi Suswandika (2013) "Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi, Laba Fiskal, Tingkat Hutang Pada Persistensi laba".	X1: Perbedaan Laba Akuntansi, Laba Fiskal X2: Tingkat Hutang Y: Persistensi Laba	**Variabel Bebas:** Perbedaan Laba Akuntansi, Laba Fiskal dan Tingkat Hutang. **Variabel Terikat:** Persistensi Laba.	**Sektor yang diteliti:** Perusahaan Perbankan yang terdafar di BEI periode 2007-2011.	Semakin besar perbedaan negatif antara laba akuntansi dengan laba fiskal tidak menunjukan persistensi laba rendah. Semakin besar perbedaan positif maka semakin rendah persistensi laba. Tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan pada persistensi laba.
2	Zaenal Fanani (2010) "Analisis Faktor-Faktor Penentu Persistensi Laba".	X1: Votalitas Arus kas X2: Besaran Akrual X3: Votalitas Penjualan X4: Tingkat Hutang X5: Siklus Operasi Y: Persistensi Laba	**Variabel Bebas:** Tingkat Hutang. **Variabel Terikat:** Persistensi Laba.	**Variabel Bebas:** Votalitas Arus Kas, Besaran Akrual, Votalitas Penjualan, dan Siklus Operasi.	Votalitas arus kas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persistensi laba, besaran akrual berpengaruh negatif terhadap persistensi laba, votalitas penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persistensi laba, tingkat hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba, siklus operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba.
3	Titi Nur Asma (2013) "Pengaruh Aliran Kas dan Perbedaan Antara Laba Akuntansi Dengan Laba	X1: Aliran Kas X2: Perbedaan Antara Laba Akuntansi Dengan Laba Fiskal Y: Persistensi Laba	**Variabel Bebas:** Perbedaan Antara Laba Akuntansi Dengan Laba Fiskal. **Variabel**	**Variabel Bebas:** Aliran Kas.	Aliran kas operasi berpengaruh signifikan positif terhadap persistensi laba, perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal berpengaruh signifikan negatif

	Fiskal Terhadap Persistensi Laba".		**Terikat:** Persistensi Laba		terhadap persistensi laba.
4	Andreani Caroline Barus (2014) "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persistensi Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia".	X1: Arus Kas Operasi X2: *Book Tax Differences* X3: Tingkat Hutang Y: Persistensi Laba	**Variabel Bebas:** *Book Tax Differences*, Tingkat Hutang. **Variabel Terikat:** Persistensi Laba.	**Variabel Bebas:** Arus Kas Operasi.	Variabel alirans kas operasi berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba, variabel perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal dn variabel tingkat hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Berdasarkan hasil koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *Adjusted* R^2, aliran kas operasi, perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal da tingkat hutang mempengaruhi persistensi laba sebesar 0,466 atau 46,6%. Sedangkan sisanya 0,534 atau 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti.
5	Riyana (2015) "Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi Dan Laba Fiskal Terhadap Perubahan Laba".	X1: Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Y: Perubahan Laba	**Variabel Bebas:** Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal.	**Variabel Terikat:** Perubahan Laba. **Sektor yang diteliti:** Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.	Perbedaan temporer/tetap berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Perbedaan temporer berpengaruh terhadap perubahan laba akuntansi pada periode mendatang diterima.
6	Dwi Martani (2009) "Pengaruh *Book Tax Gap* terhadap Persistensi Laba".	X1: *Book Tax Gap* Y: Persistensi Laba	**Variabel Terikat:** Persistensi Laba.	**Variabel Bebas:** *Book Tax Gap.*	Variabel perubahan pendapatan tidak memiliki hubungan dengan *book tax gap*. Variabel aktiva tetap kotor memiliki hubungan negatif terhadap *book tax gap*. Variabel aktiva tidak

					berwujud kotor tidak memiliki hubungan dengan *book tax gap*. Variabel kompensasi kerugian memiliki hubungan yang positif terhadap *book tax gap*. Ukuran Perusahaan memliki hubungan yang positif terhadap *book tax gap*. Variabel beda permanen berpengaruh negatif terhadap persistensi laba. Variabel beda temporer menunjukkan nilai yang signifikan terhadap persistensi laba.
7	Fatkhur Haris Irfan (2013) "Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal Terhadap Persistensi Laba dengan Komponen Akrual dan Aliran Kas Sebagai Variabel Moderasi".	X1: Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal X2: Persistensi Laba	**Variabel Bebas:** Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal. **Variabel Terikat:** Persistensi Laba.	Memakai komponen akrual dan aliran kas sebagai variabel moderasi.	Perubahan pendapatan dan nilai aktiva tetap kotor yang besar mengakibatkan perusahaan terebut mempunyai perbedaan besar antara laba akuntansi dan laba fiskal. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak dapat menjelaskan tentang *book-tax differences*. Perusahaan manufaktur di Indonesia yang mempunyai pebedaan besar positif antara laba akuntansi dan fiskal tidak dapat mempertahankan jumlah laba di masa depan dibanding dengan perbedaan kecil antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perusahaan manufaktur di Indonesia yang mempunyai *large negative book-tax differences* tidak mempengaruhi laba perusahaan ditahun depan.

Sumber: Data Diolah

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal Pada Persistensi Laba

Informasi laba dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan mereka, seperti keputusan investasi. Informasi laba juga dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba dimasa depan sehingga informasi laba sering digunakan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan.

Persistensi laba merupakan revisi laba yang diharapkan tahun mendatang ataupun kemampuan perusahaan untuk mempertahankan laba yang diperoleh saat ini sampai masa mendatang. Selain laba akuntansi ataupun komersial, ada yang disebut laba fiskal ataupun laba pajak. Kedua laba ini mempunyai aturan ataupun standar tersendiri untuk mekanisme perhitungannya, dimana laba komersial dihitung dengan standar akuntansi yang berlaku dan laba fiskal dihitung dengan aturan ataupun standar perpajakan. Istilah yang seirng digunakan untuk perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal adalah *book-tax differences.* Laba menjadi hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena selain menjadi salah satu tolak ukur kinerja suatu perusahaan, laba juga menjadi salah satu yang mempunyai resiko tinggi untuk memberikan informasi tentang *management discretion*, karena dalam mekanisme perhitungan laba terdapat beberapa perbedaan aturan atau standar dalam akuntansi dan perpajakan.

Dalam asumsi-asumsi yang mendasari penelitian perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal untuk menilai persistensi laba, Fatkhur (2013) menyebutkan

bahwa kemampuan manajer untuk memanipulasi pelaporan laba akuntansi dalam satu periode waktu tetapi tidak untuk memanipulasi pelaporan kena pajak. Karena laba fiskal dapat mengevaluasi laba akuntansi untuk menilai kebijakan manajemen dalam proses akrual.

Laba fiskal sebagai dasar pengenaan pajak berbanding lurus dengan beban pajak. Jika laba fiskal bertambah berarti beban pajak yang harus dibayakan semakin besar, begitu pula sebaliknya jika laba fiskal berkurang maka beban pajak masa depan akan semakin kecil. Hal tersebut akan berpengaruh pada laba bersih yang merupakan jumlah neto laba yang dihasilkan oleh perusahaan setelah dikurangi dengan beban pajak. Jika penghasilan sebelum pajak konstan, maka semakin kecil beban pajak yang dibayarkan maka laba bersih yang dihasilkan akan semakin besar.

Ada beberapa biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya. Perbedaan ini yang menyebabkan adanya koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Koreksi positif menyebabkan laba fiskal bertambah. Jika laba fiskal bertambah maka beban pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar. Semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan maka semakin kecil laba yang dihasilkan. Koreksi negatif menyebabkan laba fiskal bekurang sehingga beban pajak yang harus dibayarkan semakin kecil. Beban pajak yang semakin kecil membuat laba bersih menjadi semakin besar. Hal ini yang dapat mempengaruhi persistensi laba suatu perusahaan.

Teori yang menghubungkan antara pengaruh perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal pada persistensi laba adalah sebagai berikut:

Hanlon (2005:138) menyebutkan bahwa:

"*Book tax differences* (perbedaan laba akuntansi dengan fiskal) dapat memberi informasi tentang kualitas laba pada periode sekarang".

Fatkhur (2013) menyebutkan bahwa:

> "Informasi yang terdapat pada *book tax differences* dapat mempengaruhi laba perusahaan di masa mendatang, dan dapat menaikkan praktik manajemen laba yang mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai kualitas laba yang buruk dan kurang persisten".

Suswandika dan Astika (2013) menyebutkan bahwa:

> "Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal timbul akibat standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi komersial dengan akuntansi perpajakan yang menyebabkan perusahaan setiap tahunnya melakukan rekonsiliasi fiskal".

Miles dan Newberry dalam Suswandika dan Astika (2013) menyebutkan bahwa:

> "Informasi yang berkaitan dengan kualitas/persistensi laba dari perusahaan dapat dlihat dari laba akuntansi yang dibandingkan dengan laba fiskal".

Teori ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suswandika dan Astika (2013) bahwa Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal secara signifikan berpangaruh terhadap Persistensi laba. Dan penelitian yang dilakukan oleh Barus dan Rica (2014) bahwa Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal berpengaruh positif terhadap Persistensi Laba. Serta penelitian oleh Fatkhur (2013) bahwa Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba

Fiskal berpengaruh positif terhadap Persistensi Laba.

Dari uraian tersebut di atas menjelaskan bahwa Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal memiliki pengaruh terhadap Persistensi Laba.

2.2.2 Pengaruh Tingkat Hutang Pada Persistensi Laba

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tidak terlepas dari sumber modal perusahaan dalam mengembangkan usahanya dan menghasilkan laba yang maksimal. Hutang juga mempengaruhi persistensi laba dan tingkat stabilitas perusahaan yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang.

Manajemen yang memilih hutang sebagai alternatif sumber modal dituntut untuk dapat bekerja keras agar penggunaan modal tersebut dapat memberikan keuntungan besar bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat berkembang dan mampu membayar hutang tersebut kepada kreditor.

Tingkat hutang akan menjadi besar apabila banyak utang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang mengandung konsekuensi perusahaan harus membayar bunga dan pokok pada saat jatuh tempo. IFRS (2012) mendefinisikan liabilitas sebagai utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

Karena itu, tingkat hutang tinggi bisa memberi insentif lebih kuat bagi manajer untuk mengelola laba pada prosedur yang bisa diterima.

Teori yang menghubungkan tingkat hutang pada persistensi laba adalah sebagai berikut:

Subramanyam dan Wild (2014) menyebutkan bahwa:

> "Tingkat hutang akan terlihat pengaruhnya terhadap laba masa depan disaat perusahaan dalam kondisi keuangan baik atau buruk, saat kondisi keuangan biasa-biasa saja maka pengaruhnya tidak dapat dibuktikan. Saat kondisi keuangan perusahaan baik maka beban hutang akan lebih kecil dibandingkan pengembalian yang didapat perusahaan sehingga laba yang diperoleh meningkat".

Fanani (2010) menyebutkan bahwa:

> "Besarnya tingkat hutang perusahaan akan menyebabkan perusahaan meningkatkan persistensi laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang baik di mata investor dan auditor".

Tingkat hutang diprediksi mempunyai hubungan positif dengan risiko, karena semakin tinggi tingkat hutang maka akan semakin tinggi pula laba yang diharapkan sebagai imbalan terhadap risiko dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat hutang perusahaan maka semakin rendah tingkat laba yang diharapkan sebagai imbalan terhadap rendahnya risiko tersebut.

Teori ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fanani (2010) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat hutang terhadap Persistensi Laba.

Perbedaan Laba Akuntansi dengan Laba Fiskal semakin terjadi	Tingkat Hutang semakin tinggi

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

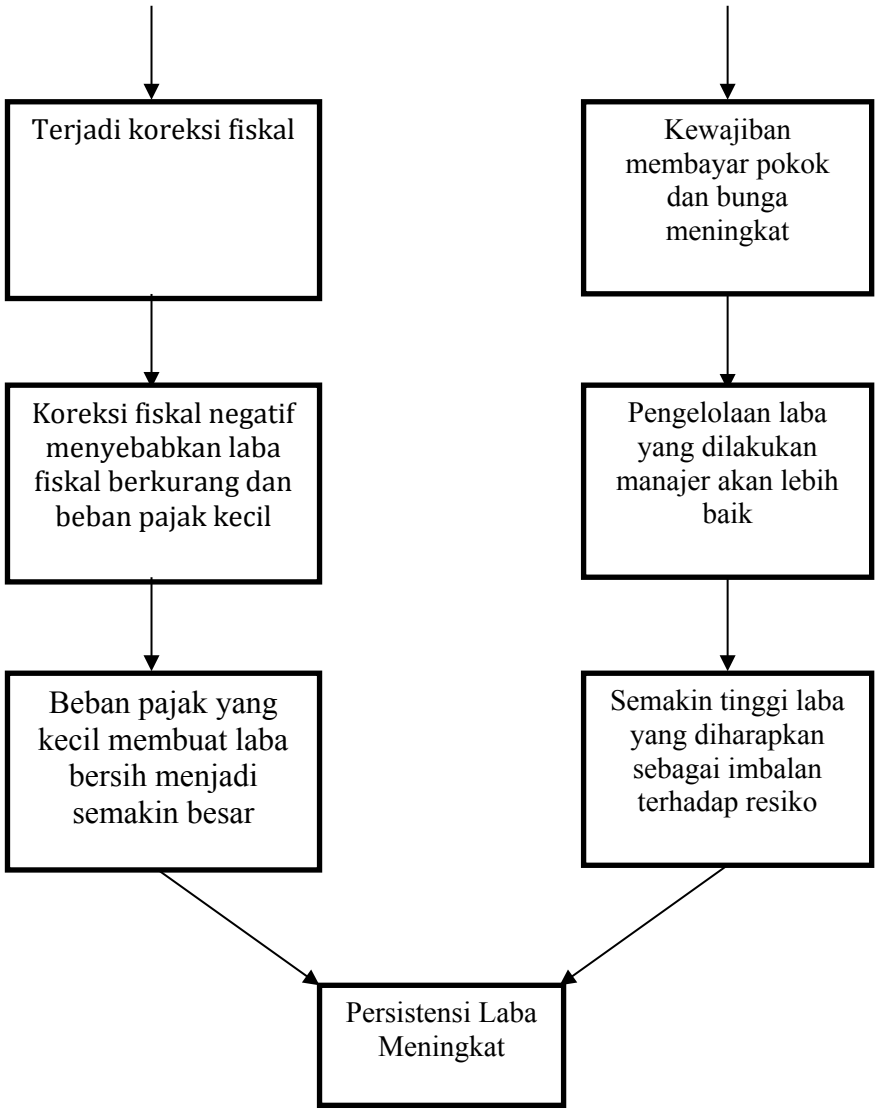

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016:63) mengungkapkan bahwa: "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan." Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_1 = Perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba.

H_2 = Tingkat Hutang berpengaruh signifikan terhadap Persistensi Laba.